

Keberlanjutan Wilayah: Keterkaitan Desa-Kota dalam Aktivitas Minapolitan di Kabupaten Malang

Regional Sustainability: Rurban Linkage on the Context of Minapolitan Activity in Malang Regency

Wawargita Permata Wijayanti^{1*} & Rahmat Aris Pratomo²

¹Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya, Jalan MT. Haryono 167, Malang 65145, Indonesia; ²Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Kalimantan Jalan Soekarno-Hatta Km. 15, Karang Joang, Balikpapan, Kalimantan Timur 76127, Indonesia;

*Penulis korespondensi. *e-mail*: wawargita.pw@ub.ac.id
(Diterima: 25 Desember 2018; Disetujui: 27 November 2019)

ABSTRACT

A rurban linkage is one of the aspects to achieve sustainable regional development, which emphasizes on balancing functions and interrelationships between rural and urban. This linkage is very important to increase the chain of economic activity, including on developing minapolitan area. However, due to bias of rural and urban function, the linkage between urban and rural became difficult to be actualized, thus creates an increasing gap between the regions. This research aims to determine the typology of rural and urban and its relationship in minapolitan activity in Malang Regency. The analysis is carried out using cluster analysis in order to determine rural and urban typology in Malang Regency. Furthermore, it is continued by using rurban linkage matrix for mapping linkages of minapolitan activities. Results show that majority of districts (20 out of 33 districts) in Malang Regency are included in the category of highly rural and only 3 districts have strong urban characteristics (rurban type A). In relation to the minapolitan, rurban linkage has begun to be well formed on fishing activity. Meanwhile, linkage in aquaculture is hard to be formed due to the development of minapolitan activity that tend to be stagnant, specifically only developing at producing areas. Findings can be used as consideration for formulating rurban linkage strategies on developing minapolitan activity.

Keywords: linkage, minapolitan activity, rurban typology.

ABSTRAK

Keterkaitan desa-kota merupakan salah satu aspek untuk mewujudkan pembangunan wilayah berkelanjutan, yang menekankan pada keseimbangan fungsi antar kedua kawasan. Keterkaitan tersebut terwujud dalam rantai aktivitas ekonomi, termasuk dalam kawasan minapolitan. Namun, fungsi desa-kota saat ini sudah sangat bias, sehingga keterkaitan desa dan kota sulit diwujudkan dan berakibat kesenjangan antar wilayah semakin tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tipologi dan jenis keterkaitan desa dan kota dalam kegiatan minapolitan di Kabupaten Malang. Proses analisis dilakukan dengan menggunakan analisis kluster untuk menentukan tipologi desa-kota. Selanjutnya, analisis juga dilakukan dengan menggunakan matriks keterkaitan desa-kota dalam memetakan jenis keterkaitan dalam kegiatan minapolitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas kecamatan (20 dari 33 kecamatan) di Kabupaten Malang termasuk dalam tipologi *highly rural* dan hanya tiga kecamatan dengan karakteristik perkotaan yang kuat (*rurban type A*).

Kaitannya dengan aktivitas minapolitan, keterkaitan desa-kota sudah mulai terbentuk dengan baik pada aktivitas perikanan tangkap. Keterkaitan terjadi dari kawasan dengan tipologi *highly rural* (pusat produksi perikanan tangkap) ke kawasan perkotaan. Sementara itu, keterkaitan pada perikanan budidaya hampir tidak terbentuk dikarenakan perkembangan aktivitas minapolitan yang cenderung stagnan dan hanya berkembang pada kawasan pusat produksi saja. Hasil temuan penelitian dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk merumuskan strategi keterkaitan desa-kota dalam pengembangan aktivitas minapolitan.

Kata kunci: aktivitas minapolitan, keterkaitan, tipologi desa-kota.

PENDAHULUAN

Keterkaitan desa dan kota merupakan aspek yang penting untuk mewujudkan pembangunan wilayah berkelanjutan. Desa dan kota memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam mendukung aktivitas ekonomi yang potensial pada wilayah tertentu. Untuk mencapai keseimbangan dan keterkaitan desa-kota yang saling menguntungkan, maka sangat diperlukan identifikasi fungsi desa dan kota pada suatu wilayah serta menentukan keterkaitan di antaranya.

Rural urban (rurban) linkage merupakan konsep pengembangan wilayah yang menitikberatkan pada keseimbangan antara desa dan kota dalam menjalankan fungsinya untuk kegiatan ekonomi, sosial, dan sebagainya. Tacoli (2003) menjelaskan bahwa keterkaitan positif pada desa dan kota dapat berupa keterkaitan ke belakang (*backward*) dan keterkaitan ke depan (*forward*). Terjadinya keterkaitan tersebut ditandai dengan adanya pergerakan, perpindahan, atau aliran (*flow*) manusia, produksi, komoditas, modal, serta informasi antar wilayah (Sietchiping *et al.*, 2014; Douglass, 1998). Keterkaitan desa-kota dapat mensinergikan seluruh sektor ekonomi yang berkembang pada wilayah tertentu dan bukan hanya pada sektor unggulan sehingga konsep ini sangat berpihak pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat lokal (Berdegue *et al.*, 2015; Tacoli, 2003). Namun, pada kenyataannya, pembangunan wilayah yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, bukan pada pemerataan aktivitas dan manfaat dari kegiatan ekonomi, seperti yang terjadi di Dar es Salaam, Tanzania (Adam *et al.*, 2016),

Chile, Colombia, dan Meksiko (Berdegue *et al.*, 2015), Assam, India (Das *et al.*, 2013), serta beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia (Rigg, 1998). Pemerataan aktivitas dan manfaat tersebut bukan hanya bagi masyarakat, tetapi juga dalam keruangan (kewilayahan).

Hambatan tersebut kemudian semakin pelik karena adanya bias fungsi antara desa dan kota (Kim, 2015). Dalam perkembangannya saat ini, desa dan kota hanya dipandang hanya dari sisi administratif. Padahal, sebenarnya desa dan kota memiliki karakteristik fisik, sosial, dan ekonomi yang berbeda (Bintarto, 1989). Apabila desa dan kota difungsikan sesuai dengan karakteristiknya, maka dapat terbentuk keterkaitan atau *linkage* di dalamnya, yang tentunya sangat menguntungkan bagi perkembangan ekonomi. Konsep keterkaitan desa kota inilah yang kemudian diadopsi dalam perkembangan minapolitan. Kawasan minapolitan memiliki struktur yang terdiri atas kawasan pusat dan sub-pusat, dimana kawasan pusat biasanya merupakan kawasan perkotaan dengan fungsi pemasaran. Sementara, kawasan sub-pusat memiliki fungsi sebagai pusat produksi dan penunjang.

Salah satu wilayah di Jawa Timur yang menghadapi permasalahan tersebut adalah Kabupaten Malang. Wilayah ini memiliki potensi dan sumberdaya alam yang melimpah sehingga *natural resources* menjadi faktor kunci dalam pengembangan ekonomi wilayahnya, termasuk aktivitas perikanan (Masterplan Minapolitan Kabupaten Malang, 2016). Beberapa kecamatan di wilayah kabupaten ini juga termasuk dalam kawasan pengembangan minapolitan sesuai dengan

Kepmen Kelautan dan Perikanan RI Nomor Kep.35/Kepmen-KP/2013. Akan tetapi, perkembangan minapolitan menghadapi banyak masalah yang kemudian mengakibatkan pertumbuhan ekonomi sektor ini cenderung rendah.

Penyelesaian permasalahan dalam kegiatan minapolitan tersebut bukan hanya melalui pendekatan internal (input, proses, output) kegiatan minapolitan, tetapi juga dengan pendekatan kewilayahan. Pendekatan kewilayahan yang dimaksud adalah memposisikan dan memfungsikan setiap bagian dari wilayah (desa dan kota) yang terlibat dalam kegiatan perikanan untuk dapat berperan optimal. Pradoto *et al.* (2018) menjelaskan bahwa perpaduan kegiatan perdesaan dan perkotaan dapat membentuk suatu konektivitas yang unik dan menguntungkan, sehingga diperlukan suatu intervensi yang lebih intensif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa keterkaitan desa-kota dalam kegiatan minapolitan di Kabupaten Malang. Oleh karenanya, penelitian didahului dengan menentukan tipologi desa dan kota di Kabupaten Malang, kemudian mengobservasi keterkaitan (*linkages*) yang terjadi antar desa-kota tersebut dalam pengembangan aktivitas minapolitan.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Malang yang terdiri atas 33 kecamatan. Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur dengan luas 3,530.65 km². Kabupaten ini terletak pada 112°17' sampai 112°57' Bujur Timur dan 7°44' sampai 8°26' Lintang Selatan.

Penelitian dimulai dengan identifikasi keterkaitan dalam pengembangan aktivitas minapolitan di Kabupaten Malang. Aktivitas minapolitan yang dimaksud terdiri atas mina hulu, mina proses, dan mina hilir. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dan observasi langsung pada 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang.

Kedua, menentukan tipologi desa dan kota dengan teknik analisis cluster (SPSS). Analisa ini digunakan untuk mengelompokkan variabel bebas sesuai dengan karakteristik data (Simamora, 2005). Dalam penelitian ini, analisis cluster digunakan untuk mengelompokkan wilayah kecamatan di Kabupaten Malang berdasarkan karakteristik perkotaannya. Data yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 1. Data diperoleh melalui wawancara dan pengumpulan data sekunder melalui Kecamatan dalam Angka dan Kabupaten Malang dalam Angka tahun 2018.

Tabel 1. Data yang digunakan untuk menentukan tipologi desa dan kota

Variabel	Data yang Digunakan
Fisik	Proporsi luas lahan terbangun per kecamatan (%); Jarak ke pusat kota (ibukota kabupaten) (km); Jarak ke bandar udara terdekat; Jarak ke pelabuhan terdekat; Proporsi luas lahan yang terbatas (lahan untuk konservasi, lindung, rawan bencana, dan sebagainya) (%); Perkembangan luas lahan terbangun (km ²);
Ekonomi	Prosentase perkembangan sektor industri dan jasa dalam PDRB (%); Jumlah industri dan jasa (%); Jumlah pekerja sektor industri dan jasa dibandingkan jumlah penduduk kerja (jiwa); Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan non pertanian tidak unggulan (%);
Sosial dan politik	Prosentase penduduk yang lulus SMA dan Perguruan Tinggi (%); Tingkat angkatan kerja (%); Jumlah pengangguran (jiwa); Proporsi mata pencaharian penduduk berbasis pertanian dan non-pertanian

Sumber: Muta'ali, 2002; Handayani, 2011

Ketiga, menentukan *linkage system* guna memahami keterkaitan antara desa-kota (*rurban linkage*) dalam kegiatan minapolitan di Kabupaten Malang. Keterkaitan ini diketahui dengan mengidentifikasi keterkaitan kawasan dalam subsistem hulu, proses, hilir, dan jasa penunjang. Selanjutnya, memetakan keterkaitan desa-kota dalam bentuk matriks guna menunjukkan asal dan wilayah tujuan. Dengan demikian, dapat dievaluasi sejauh mana

keterkaitan yang terjadi antar desa dan kota dalam kegiatan minapolitan.

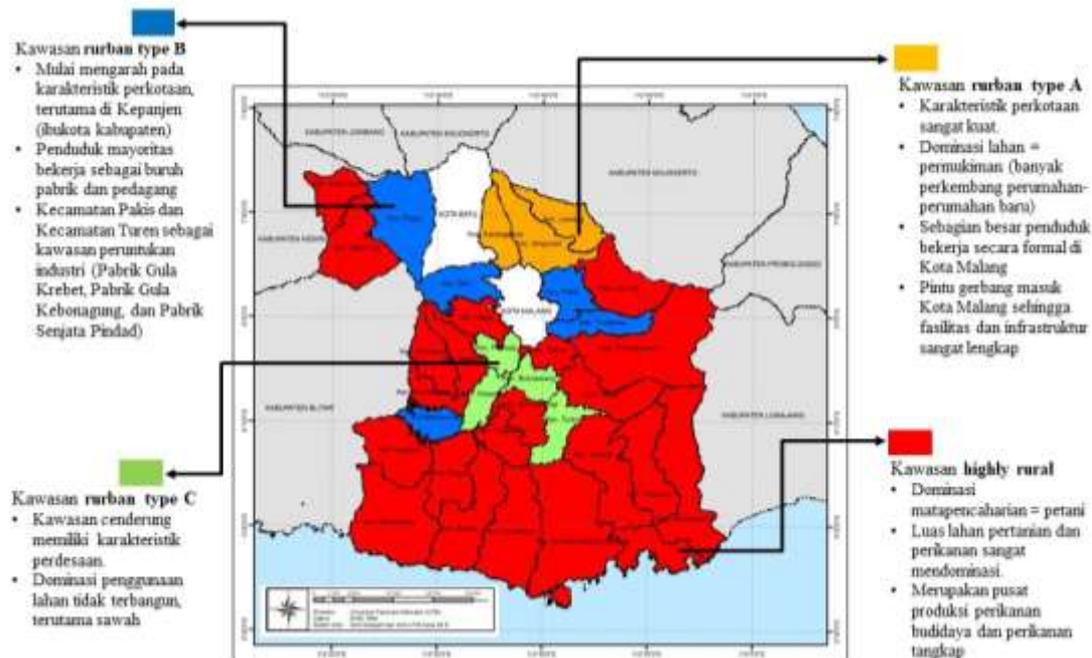
HASIL DAN PEMBAHASAN

Guna menentukan *linkage* desa-kota yang terbentuk dari aktivitas minapolitan di Kabupaten Malang dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu (1) menentukan tipologi desa-kota di Kabupaten Malang, (2) memetakan lokasi (asal-tujuan) untuk sub-sistem aktivitas minapolitan, dan (3) menghubungkan sub-sistem minapolitan dengan hasil tipologi desa-

kota. Hasil analisa tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tipologi Desa dan Kota di Kabupaten Malang

Berdasarkan analisa cluster diketahui bahwa tipologi desa dan kota di Kabupaten Malang terbagi menjadi 4, yaitu desakota tipe A (*rurban type A*), desakota tipe B (*rurban type B*), desakota tipe C (*rurban type C*), dan desa (*highly rural type*). Tipologi desa kota di Kabupaten Malang dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta Tipologi Desa dan Kota di Kabupaten Malang

Wilayah dengan tipe sangat desa (*highly rural*) terdiri dari 20 kecamatan, dengan aspek fisik-lingkungan yang ditandai dengan jumlah penduduk yang relatif rendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Sebagian besar kecamatan tersebut juga berada pada daerah pinggiran dengan jarak menuju pusat kota cukup jauh. Karakteristik yang paling mencolok dari kelompok ini adalah proporsi lahan pertanian maupun perikanan serta komposisi matapecaharian di bidang tersebut juga yang cukup tinggi. Beberapa kecamatan pada kelompok ini bahkan juga ditetapkan sebagai kawasan pusat produksi perikanan budidaya (Kecamatan Wajak, Kecamatan Donomulyo, Gondanglegi, Wonosari, serta Ampelgading),

dan Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Bantur, dan Kecamatan Gedangan sebagai pusat perikanan tangkap. Meskipun kaya akan sumberdaya perikanan, tidak semua wilayah kecamatan tersebut mengembangkan kegiatan minapolitan dengan optimal.

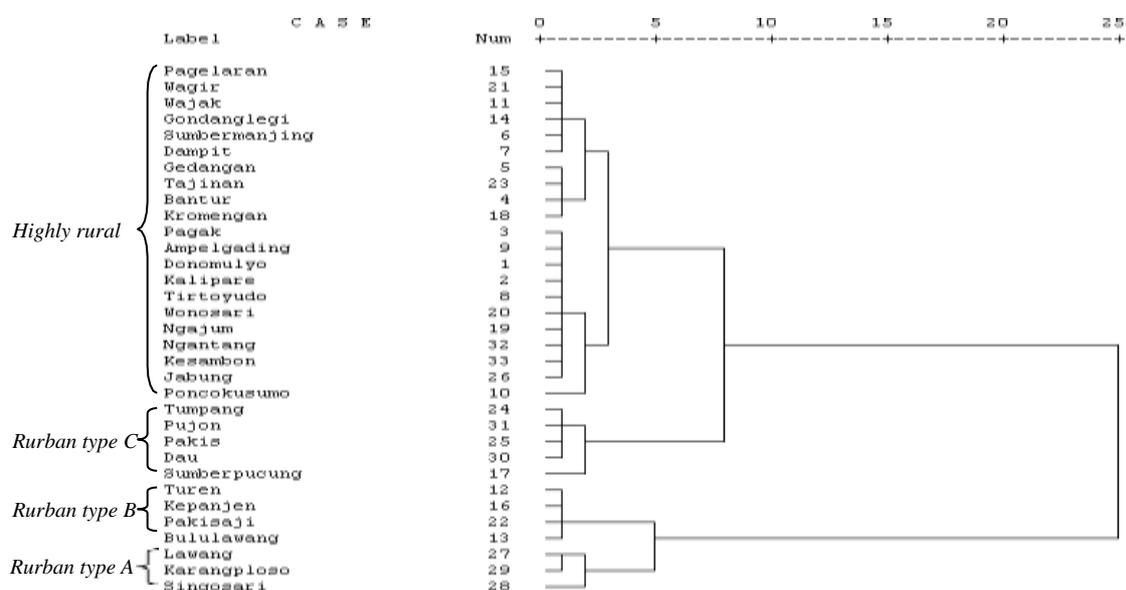
Tipologi *rurban type C* memiliki karakteristik yang berbeda dengan tipe *highly rural*. Ditinjau dari sisi fisik, perubahan lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun pada kelompok ini cenderung meningkat. Dari sisi ekonomi, matapecaharian penduduk sudah tidak lagi dominan di sektor pertanian maupun perikanan. Pekerjaan yang berbasis pada non-sumberdaya pertanian, seperti PNS, buruh

industri, pekerja wisata cukup mendominasi, khususnya di Kecamatan Poncokusumo.

Sementara itu, karakteristik kawasan pada tipologi *rurban type B* sudah mengarah pada karakteristik perkotaan. Tipe ini memiliki karakteristik perkembangan lahan terbangun yang tinggi, sementara perkembangan lahan pertaniannya rendah. Selain itu, perkembangan jumlah pekerja industri dan perdagangan cukup tinggi, walaupun tidak sebesar pada *rurban type A*. Perkembangan karakteristik perkotaan di tipologi ini juga dipengaruhi oleh kebijakan tata ruang yang mengamankan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Turen sebagai kawasan perindustrian. Hingga tahun 2017 terdapat ± 30 industri besar berada di Kecamatan Pakis dimana jumlah tersebut paling tinggi se-Kabupaten Malang. Selain itu, Kecamatan Kepanjen merupakan ibukota Kabupaten Malang sehingga karakteristik perkotaannya juga mulai menguat.

Karakteristik yang sangat berbeda terlihat pada tipologi *rurban type A*, yaitu Kecamatan Singosari, Karangploso, serta Lawang. Pada tipologi ini, karakteristik perkotaannya terlihat dengan jelas. Dilihat dari sisi fisik, komposisi lahan terbangun lebih tinggi dibandingkan dengan lahan non-terbangun ($\pm 68\%$), yang didominasi oleh penggunaan lahan permukiman. Perkembangan lahan terbangun

yang pesat di kecamatan-kecamatan tersebut disebabkan karena (1) kecamatan tersebut merupakan pintu gerbang menuju Kota Malang dan Kota Batu sehingga intensitas pergerakan penduduk sangat tinggi. Penduduk dari kota maupun Kabupaten Malang yang menuju Kota Surabaya dan sekitarnya selalu melintasi jalan utama di kecamatan tersebut. (2) Letak kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Malang menjadikan kawasan tersebut cocok untuk dikembangkan sebagai kawasan permukiman. Hingga tahun 2017, hampir 50% perumahan baru yang ada di Kota Malang dan Kabupaten Malang terletak di ketiga kecamatan tersebut. Selain itu, dengan harga lahan dan harga rumah yang lebih terjangkau, kawasan permukiman di kecamatan tersebut sangat menarik perhatian penduduk Malang dan sekitarnya. (3) Dengan banyaknya penduduk yang bermukim di kawasan tersebut, perkembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung di ketiga kecamatan sangat pesat. Banyak dijumpai minimarket dan supermarket di kawasan tersebut yang kemudian memudahkan penduduk untuk mengaksesnya. Dilihat dari sisi ekonomi, mata pencaharian penduduk sudah didominasi oleh sektor non pertanian. Sebagian besar penduduk di kecamatan-kecamatan tersebut bekerja sebagai pegawai di Kota Malang.



Gambar 2. Dendrogram tipologi desa-kota di Kabupaten Malang
 Sumber: Hasil analisa, 2018

Aktivitas minapolitan di Kabupaten Malang terdiri atas perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap difokuskan di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo, Bantur, serta Gedangan. Sementara, perikanan budidaya dikembangkan di Wajak, Kecamatan Donomulyo, Gondanglegi, Wonosari, serta Ampelgading.

Keterkaitan Desa Kota dalam Aktivitas Minapolitan di Kabupaten Malang

Berdasarkan tipologi desa-kota, semua kecamatan yang menjadi pusat kegiatan

perikanan berada pada tipologi *highly rural*. Keterkaitan desa-kota dalam aktivitas minapolitan di Kabupaten Malang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Aktivitas minapolitan tangkap

Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo, Bantur, serta Gedangan merupakan pusat perikanan tangkap. Hal ini didorong oleh letak keempat kecamatan yang berada di sepanjang pesisir selatan Kabupaten Malang, berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Keterkaitan antara desa dan kota yang terbentuk dalam kegiatan perikanan tangkap.

Tabel 2. Keterkaitan Desa-Kota dalam Aktivitas Minapolitan Tangkap

Sub-sistem minapolitan	Variabel	Keterkaitan dalam Minapolitan	Keterkaitan desa-kota
Mina hulu	Tenaga kerja	Mayoritas nelayan berasal dari Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo, Bantur, dan Gedangan	<i>Highly rural - highly rural</i>
	Peralatan tangkap	Peralatan tangkap (BBM, makanan, dan sebagainya) didapatkan dari dalam wilayah Sumbermanjing. Sementara, peralatan jarring, kail, umpan, dan peralatan untuk menservis kapal diperoleh dari Kecamatan Kepanjen.	<i>Highly rural - rurban type B</i>
	Modal (uang)	Modal untuk melaut diperoleh nelayan dengan cara kredit/berhutang dengan koperasi yang berada di Kecamatan Kepanjen	<i>Highly rural - rurban type B</i>
Mina proses	Air bersih	Air bersih diperoleh dari dalam kawasan minapolitan tangkap	<i>Highly rural - highly rural</i>
	<i>Cold storange</i>	Penyediaan <i>cold storage</i> dilakukan nelayan bekerja sama dengan tengkulak/pemborong ikan yang berasal dari Kecamatan Kepanjen dan Lawang	<i>Highly rural - rurban type B dan type A</i>
Mina hilir	Pengolahan ikan	Pengolahan ikan dilakukan di Kecamatan Sumbermanjing Wetan dan produknya dipasarkan di Kecamatan Kepanjen, Lawang, dan Karangploso	<i>Highly rural -rurban type B dan type A</i>
	Pemasaran	Produk dari keempat kecamatan penghasil ikan dijual ke pasar-pasar tradisional dan tengkulak di Kecamatan Lawang, Karangploso, Kepanjen	<i>Highly rural -rurban type B dan type A</i>

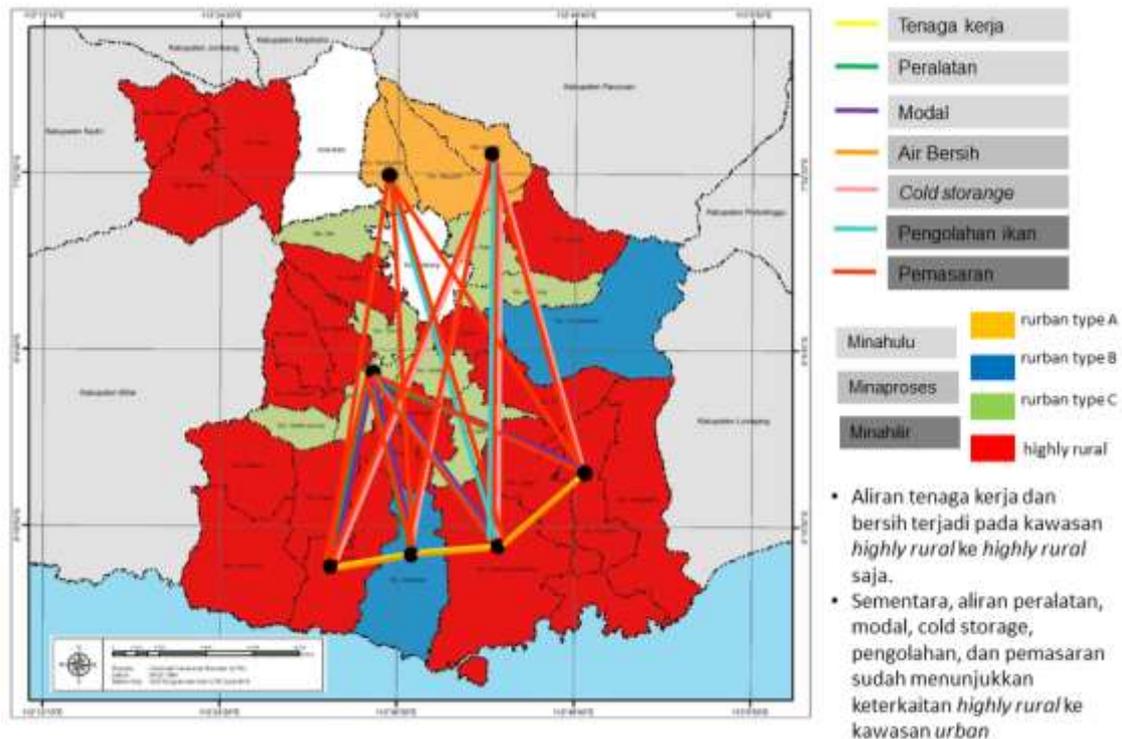
Sumber: Hasil analisa, 2018

Berdasarkan Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa dalam aktivitas minapolitan perikanan tangkap, keterkaitan desa-kota sudah mulai terbentuk, baik pada sub-sistem mina hulu, mina proses, maupun mina hilir. Pada dasarnya, daerah produksi ikan termasuk dalam kategori *highly rural*. Hal ini memang sesuai dengan karakteristik *highly rural* yang difokuskan

untuk pengembangan aktivitas perdesaan dimana salah satunya adalah kegiatan perikanan. Sementara itu, proses pemasaran dan penjualan produk dilakukan di kecamatan-kecamatan yang memiliki karakteristik perkotaan yang lebih kuat. Hal ini dikarenakan kawasan tersebut memiliki pangsa pasar yang lebih luas dan didukung oleh keberadaan pasar tradisional

yang lebih besar. Namun, keterkaitan desa-kota dalam minapolitan tangkap ini masih terhalang oleh kondisi infrastruktur yang kurang baik. Lebar jalan yang sempit dan kondisi jalan yang rusak mengakibatkan waktu tempuh dari TPI (Tempat Pelelangan Ikan) di Kecamatan

Sumbermanjing Wetan ke lokasi pasar (Kepanjen, Lawang, dan Karangploso) cukup lama. Akibatnya, ikan menjadi kurang segar untuk dijual karena lamanya perjalanan dan kurangnya ketersediaan *cold storage*.



Gambar 3. Keterkaitan desa-kota dalam aktivitas minapolitan (perikanan tangkap) di Kabupaten Malang
Sumber: Hasil analisa, 2018

b) Aktivitas minapolitan budidaya

Pengembangan aktivitas minapolitan budidaya air tawar difokuskan di Kecamatan Wajak, Kecamatan Donomulyo, Gondanglegi, Wonosari, serta Ampelgading. Meskipun ada tiga kecamatan yang menjadi prioritas pengembangan perikanan (sesuai dengan Kepmen Perikanan dan Kelautan tahun 2012), kegiatan perikanan budidaya hanya berkembang di Kecamatan Wajak. Jenis ikan yang dibudidayakan di kecamatan tersebut adalah nila, dan lele. Keterkaitan antara desa dan kota yang terbentuk dalam kegiatan perikanan budidaya pada Tabel 3.

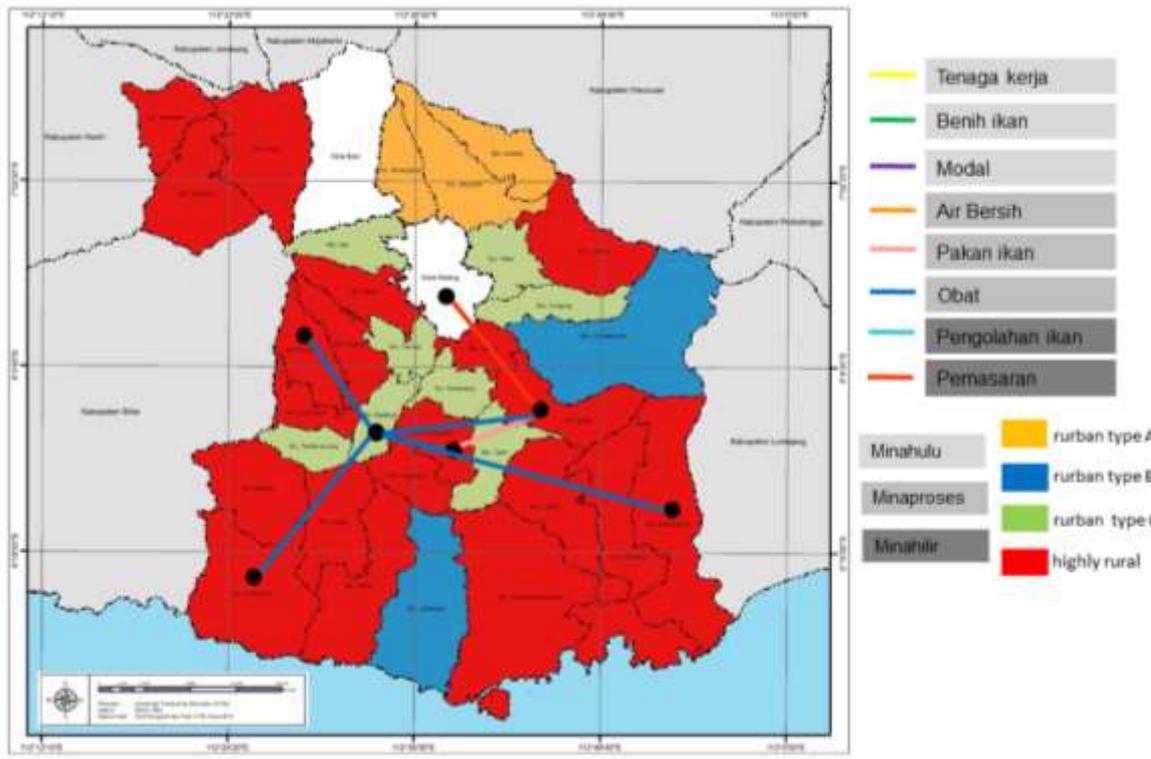
Sesuai dengan Tabel 3 terlihat bahwa interaksi desa-kota pada aktivitas minapolitan budidaya hampir tidak terbentuk. Kondisi ini disebabkan karena aktivitas budidaya yang dilakukan oleh masyarakat hanya sebatas

pekerjaan sampingan atau hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pribadi. Padahal, tujuan kegiatan minapolitan sebenarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana tujuan tersebut dapat tercapai apabila kegiatan produksi dilakukan dengan optimal.

Akibat kegiatan yang tidak berkembang, interaksi dalam kegiatan budidaya ikan terjadi dari kawasan *highly rural* ke kawasan *highly rural* saja. Oleh karena itu, kegiatan perikanan budidaya perlu lebih dikembangkan, misalnya dengan cara memperluas lahan perikanan budidaya, memberikan penyuluhan pada masyarakat untuk pengembangan kegiatan perikanan budidaya, pengembangan komoditas unggulan, serta memperluas jaringan kerjasama antara pembudidaya dengan Lembaga permodalan. Semakin berkembangnya

perikanan, maka seharusnya terbentuk interaksi desa-kota. Hal ini dapat didorong karena pusat produksi perikanan budidaya tidak akan bisa menyediakan kebutuhan untuk kegiatan

perikanan secara mandiri. Artinya, kawasan *highly rural* pasti membutuhkan dukungan kawasan lain dalam pemenuhan kebutuhan untuk perikanan.



Gambar 4. Keterkaitan desa-kota dalam aktivitas minapolitan (perikanan budidaya) di Kabupaten Malang
Sumber: Hasil analisa, 2018

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbentuk 4 tipologi desa-kota di Kabupaten Malang, mulai dari kawasan yang sangat mencirikan perdesaan (*highly rural*) hingga kawasan dengan karakteristik perkotaan yang sangat kuat (*rurban type A*). Tipologi desa-kota terbanyak adalah *highly rural* dengan 20 kecamatan. Sementara itu, kawasan dengan tipologi *rurban type A* hanya 3 kecamatan, yang merupakan pintu gerbang (masuk) ke kawasan Kota Malang dan Kabupaten Malang. Sementara itu, Kecamatan Kepanjen yang merupakan ibukota kabupaten tidak termasuk dalam tipologi tersebut karena karakteristik kawasan yang kurang mencerminkan perkotaan.

Dilihat berdasarkan keterkaitan antar desa-kota, keterkaitan desa-kota sangat terlihat pada aktivitas minapolitan tangkap. Hampir semua sub-sistem perikanan tangkap

menunjukkan adanya keterkaitan antara kawasan produsen (*dalam kategori highly rural*) dengan kawasan perkotaan (*rurban type A*). Kondisi tersebut sangat berbeda dengan aktivitas perikanan budidaya dimana hampir tidak terbentuk keterkaitan. Hal ini dipicu oleh kurang berkembangnya aktivitas perikanan budidaya sehingga *linkage* antar kawasan tidak terbentuk. Lebih lanjut, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Malang dalam pengembangan minapolitan, bukan hanya mengembangkan sub-sistemnya, tetapi juga membentuk keterkaitan antar kawasan. Hal ini sesuai dengan tujuan pengembangan minapolitan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kawasan, mulai dari hulu hingga hilir.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, C., Bevan, D., & Gollin, D. (2018). Rurban linkages, Public Investment, and Transport Costs: the case of Tanzania. *World Development*, 109, 497–510.
- Berdegue, Julio, A., Carriazo, F., Jara, B., Modrego, F., & Soloaga, I. (2015). Cities, Territories, and Inclusive Growth: Unraveling Urban–Rural Linkages in Chile, Colombia, and Mexico. *World Development*, 73, 56–71.
- Bintarto. (1989). *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Gramedia.
- Das, Ira, Dutta, M. K., & Borbora, S. (2013). Rurban linkages for development of rural economy in Assam: a sosial accounting matrix approach. *International Journal of Rural Management*, 9 (2), 183-208.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang. (2016). *Masterplan Kawasan Minapolitan Kabupaten Malang*.
- Douglas, M. (1998). A Regional Network Strategy for Reciprocal RurbanLinkages : An Agenda for Policy Research with Reference to Indonesia, *Third World Planning Review*, 20 (1), 1–33.
- Handayani, W. (2011). Rurban regions in Central Java: is it constructive urbanizations?. *Proc. The 5th International Conference of the International Forum on Urbanism (IFoU)*. Singapore.
- Kementrian Kelautan dan Perikanan. (2012) *Permen Kelautan dan Perikanan RI No. Per 18/MEN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Minapolitan*. Jakarta
- Kementrian Kelautan dan Perikanan. (2013). *Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor Kep.35/Kepmen-KP/2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan*. Jakarta.
- Kim, S. M. (2015). An Empirical Analysis on Urban-Rural Linkage in Mumbai Metropolitan Area. *The Journal of Development Practice*, 2, 20–25.
- Muta'ali, L. (2002). *Pola Perkembangan Karakteristik Kekotaan Pada Desa-desa di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM.
- Pradoto, W., Setiyono, B., & Wahyono, H. (2018). Peri-urbanization and the dynamics of urban-rural linkage: the case of Sukoharjo Regency, Central Java. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*, 202, 1–9.
- Rigg, J. (1998). Rurban Interactions, Agriculture and Wealth: a Southeast Asian Perspective. *Progress in Human Geography*, 22 (4), 497–522.
- Sietchiping, R., Kago, J., Zhang, X. Q., Augustinus, C., & Raf Tuts. (2014). Role of Urban–Rural Linkages in Promoting Sustainable Urbanization. *Environment and Urbanization Asia*, 5 (2), 219–234.
- Simamora, B. (2005). *Analisis Multivariat Pemasaran*. Gramedia.
- Tacoli, C. (2003). The links between urban and rural development. *Environment and Urbanization*, 15 (1), 3–12.